

## Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) (Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Sumpersari Di Kabupaten Jember)

**Dafillah Vike Eryana**<sup>1</sup>

[dafillahvikee@gmail.com](mailto:dafillahvikee@gmail.com)

**Oryza Ardhiarisca**<sup>2\*</sup>

[oryza\\_risca@polije.ac.id](mailto:oryza_risca@polije.ac.id)

**Berlina Yudha Pratiwi**<sup>3</sup>

[Berlina\\_y@polije.ac.id](mailto:Berlina_y@polije.ac.id)

**Siska Aprilia Oktaviani**<sup>4</sup>

[siska\\_aprilia@polije.ac.id](mailto:siska_aprilia@polije.ac.id)

\*Corresponding Author

**Politeknik Negeri Jember**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyse the implementation of the Local Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) at the Sumpersari Sub-district Office in Jember Regency. The method used in this study is qualitative descriptive, with data collected through interviews. The results of the study indicate that the implementation of SIPD RI at the Sumpersari Sub-district Office in Jember Regency has not yet been fully optimised. This is due to several obstacles in its implementation. In terms of communication, the implementation of SIPD RI has been running smoothly, as evidenced by effective communication between the Head of the Planning and Finance Sub-Division, staff, and relevant parties, thereby supporting the smooth running of policies and minimising obstacles in the implementation process. However, in terms of resources, the implementation of SIPD RI has not been optimal due to ongoing issues with equipment, such as technical system faults and inadequate internet connectivity. In terms of disposition, the implementation of SIPD RI has also not been maximised as there are still challenges regarding user understanding, such as a lack of attention to detail during the data entry process. Furthermore, in terms of bureaucratic structure, the implementation of SIPD RI has not been optimal due to the absence of specific written Standard Operating Procedures (SOPs) regarding the use of SIPD RI.*

**Keywords :** *implementation, local government information system of the republic of indonesia*

### **1. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan. Ketika teknologi informasi berkembang dengan cepat, maka hal tersebut dapat mengembangkan efisiensi dan kinerja sistem pengendalian sumber daya. Perkembangan teknologi informasi ini mendorong sektor pemerintah untuk menerapkan sistem. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam penyajian informasi serta memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan terpercaya.

Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah menerbitkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIPD sebagai aplikasi umum dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SIPD adalah aplikasi yang digunakan pemerintah daerah sebagai alat bantu untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif (Manoe et al., 2023). Penerapan aplikasi berbasis web tersebut bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengawasan serta evaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri, masih terdapat sekitar 26% pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan SIPD secara optimal (Arif dan Firmansyah, 2024). Meskipun sistem ini dinilai mampu mempermudah pelaksanaan tugas

pemerintah daerah berbagai kendala dalam penerapannya masih sering terjadi, sehingga berpotensi menghambat kinerja dan efektivitas pekerjaan. Dengan adanya hal tersebut, pada tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri kembali mengembangkan versi terbaru Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yaitu SIPD RI, yang telah melalui tahap uji coba pada tahun anggaran 2023.

Transformasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Kantor Kecamatan Sumbersari telah dilaksanakan pada tahun 2023. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa hambatan, khususnya pada Subbagian Perencanaan. Kendala yang sering terjadi meliputi lambatnya akses dan gangguan sistem, sehingga pengelolaan keuangan daerah belum berjalan optimal dan transparan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh jaringan internet yang kurang memadai, sehingga akses SIPD RI sering lambat dan terputus, yang berdampak pada keterlambatan pelaporan keuangan daerah. Selain itu, aparatur juga masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemampuan administratif untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan sistem yang baru.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia pada Kantor Kecamatan Sumbersari. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) Pada Kantor Kecamatan Sumbersari di Kabupaten Jember. Topik implementasi SIPD telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Aditiya, Dian, & Kusuma (2024) dengan fokus penelitian pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Sijabat, Siringoringo, & Simanjutak (2024) dengan fokus penelitian Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SIPD menyatakan bahwa masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti adanya kendala jaringan internet dan kebijakan Pemkab yang belum menggunakan SIPD dalam hal penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan (Nirmala et al., 2023). Selain itu, pada penelitian Sari (2024) menyatakan bahwa implementasi SIPD RI belum efektif, karena terdapat kendala terjadinya eror, jaringan server yang macet atau loading saat digunakan adalah beberapa alasan mengapa penerapannya masih belum efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus dari penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sumbersari di Kabupaten Jember yang belum pernah diteliti sebelumnya dan lebih fokus meneliti mengenai SIPD RI yang penelitiannya masih sedikit dilakukan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Good Governance*

*Good governance* merupakan pemerintahan yang dikendalikan dengan baik dalam proses maupun hasil – hasilnya. Salah satu bentuk penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik ditunjukkan melalui adanya sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan sepenuhnya. Menurut Mardiasmo (2018) salah satu tujuan pembangunan sektor publik adalah membangun pemerintahan yang baik. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu pengendalian manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab serta menaati prinsip efisiensi demokrasi dan menghindari korupsi administratif maupun politik.

Dalam pemerintahan yang baik meninjau fungsi masyarakat yang menciptakan negara, suara, dan pendapat masyarakat. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa pemerintah harus terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahannya. *Good Governance* merupakan indikator keberhasilan reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip prinsip yang terealisasi. Berikut ini prinsip – prinsip *good governance* menurut Santosa (2017) yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, responsive pelayanan, desentralisasi, demokrasi, keadilan, responibilitas, efektivitas dan efisiensi, berorientasi kepada konsesus, kesetaraan, dan visi strategis keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat, terkait, dan tidak dapat berdiri sendiri.

### 2.2 Teori Implementasi Kebijakan (Edward III)

Pada penelitian ini menggunakan teori Edward III untuk mengukur implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Pengukuran keberhasilan implementasi dapat

dilakukan melalui evaluasi proses, yakni dengan menilai apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan (Amanah, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak penelitian terdahulu yang telah menggunakan teori ini untuk menilai implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam berbagai situasi. Terdapat 4 (empat) variabel dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) antara lain Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

### 2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri (2019) tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa sistem ini digunakan dalam pengendalian pembangunan daerah. Sistem tersebut merupakan alat untuk menyusun, mengawasi, dan menilai dokumen pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara elektronik yang terintegrasi antar daerah (Tjandra, 2024). Selain itu, sistem tersebut merupakan alat untuk menghubungkan data keuangan dan informasi pemerintah daerah serta pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri guna untuk menjamin bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang memuat ketentuan mengenai jenis – jenis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Informasi Pembangunan Daerah  
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Sistem ini memudahkan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD sehingga analisis serta gambaran pembangunan daerah lebih mudah diperoleh. SIPD juga menjadi dasar pembaruan data perencanaan.
2. Informasi Keuangan Daerah  
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat mengelola data keuangan daerah secara lebih optimal, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, sistem ini memudahkan proses pemantauan, pengelolaan, serta penyusunan dokumen elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya  
SIPD dapat menyediakan berbagai informasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Informasi tersebut meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) selama satu tahun, peraturan daerah (PERDA), serta informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai pihak terkait.

### 3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam mengolah dan menganalisis data yang sudah di dapatkan. Penelitian ini akan berfokus pada implementasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Analisis akan dilakukan menggunakan data primer menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hal tersebut sesuai untuk penelitian ini, karena peneliti bisa melakukan wawancara terhadap bidang perencanaan pada Kantor Kecamatan Sumbersari yang sudah menggunakan SIPD RI sebagai sumber datanya. Informan penelitian yakni Kepala Sub Bagian perencanaan dan keuangan dan staf operator sub bagian Perencanaan dan keuangan. Keseluruhan data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui beberapa tahapan yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992:16) dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Komunikasi

Aspek komunikasi dapat ditinjau dari tiga indikator yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Indikator pertama yakni transmisi. Transmisi dimaknai sebagai penyampaian informasi yang baik hingga tidak hanya kepada pelaksana kebijakan akan tetapi kepada kelompok sasaran. Pada implementasi SIPD RI, transmisi informasi telah berjalan baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa informasi program telah disampaikan dengan sistematis, berjenjang dari pusat hingga ke kecamatan dalam berbagai saluran baik surat edaran ataupun melalui grup *whatsapp*.

Indikator yang kedua yakni kejelasan. Kejelasan dimaknai sebagai penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan harus jelas agar tidak menjadi multitafsir. Informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait program SIPD RI tersampaikan dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh pelaksana di kecamatan Summersari.

Indikator yang ketiga yakni konsisten. Konsisten memiliki makna bahwa hal ataupun kebijakan yang disampaikan harus konsisten begitu juga dalam implementasi. Informasi dan instruksi yang disampaikan oleh pusat terkait SIPD RI dilaksanakan secara konsisten sebanyak dua kali dalam satu tahun yakni saat penginputan anggaran dan penambahan anggaran.

Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa komunikasi terkait SIPD RI di Kecamatan Summersari telah dilakukan dengan efektif serta berdampak pada kelancaran kebijakan dan meminimalkan kendala dalam proses implementasi. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution & Nurwani (2021). Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa dalam mewujudkan implementasi SIPD, salah satu faktornya yakni terkait komunikasi yang lancar diantara para pembuat kebijakan dan kelompok sasaran dalam menghasilkan informasi. Hasil ini sesuai dengan teori *good governance*, khususnya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi ditunjukkan dari adanya informasi yang mudah dipahami oleh seluruh pelaksana. Sedangkan akuntabilitas tersirat dari adanya koordinasi dan instruksi yang disampaikan secara konsisten. Pihak-pihak terkait memiliki tanggung jawab bahwa informasi tersebut diterima serta diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 4.2 Sumber Daya

Aspek sumber daya terdiri dari empat sub indikator meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana, dan sumber daya kewenangan. Indikator pertama yakni sumber daya sarana dan prasarana. Indikator sumber daya sarana dan prasarana yang digunakan dalam penerapan SIPD RI masih terdapat kendala atau hambatan, seperti jaringan internet yang digunakan lambat, dikarenakan akses internet yang digunakan tidak hanya digunakan oleh para pengguna SIPD RI di lingkungan Kantor Kecamatan Summersari, tetapi akses tersebut digunakan oleh beberapa staf lainnya, sehingga jaringan internet yang digunakan lambat. Selain itu, sistem yang digunakan sering terjadi kendala teknis, seperti *downtime* atau *error*, dengan adanya hal tersebut pastinya akan menghambat pekerjaan. Meskipun terdapat kendala pada aspek sumber daya sarana dan prasarana dalam implementasi SIPD RI, namun staf atau pengguna SIPD RI yang terlibat sudah memiliki kompetensi yang sesuai dan berpengalaman dalam penggunaan teknologi, sehingga hal tersebut mendukung kelancaran implementasi SIPD RI. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang kedua yakni sumber daya manusia mendukung implementasi SIPD RI di kecamatan Summersari.

Selain itu, pada indikator yang ketiga yakni indikator sumber daya kewenangan. Pada sumber daya kewenangan pada Kantor Kecamatan Summersari dalam implementasi SIPD RI telah jelas dan ditetapkan berdasarkan struktur jabatan masing – masing pengguna dan terdapat pembatasan akses SIPD RI sesuai dengan kewenangan yang ada. Meskipun dalam penerapan SIPD RI di lingkungan Kantor Kecamatan Summersari tidak terdapat anggaran khusus untuk penerapannya dikarenakan sistem ini berbasis *web*, tetapi Kantor Kecamatan Summersari menggunakan dana yang ada dalam hal pemeliharaan peralatan yang menunjang implementasi SIPD RI.

Jaringan internet di Kantor Kecamatan Summersari yang digunakan masih kurang optimal, selain itu sistem yang digunakan sering *down*. Meskipun terdapat kendala atau hambatan dalam hal sumber daya peralatan yang digunakan, tetapi staf yang terlibat dalam penggunaan SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari memiliki staf yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga hal

tersebut mendukung kelancaran dalam implementasi SIPD RI. Dalam penerapan SIPD RI pada Kantor Kecamatan Summersari juga terdapat pembatasan akses pengguna sesuai dengan jabatan, meskipun terdapat pembatasan akses pada situasi tertentu bisa bersifat terbuka, seperti saat staf operator perlu menggunakan akun pengguna lain untuk keperluan yang harus dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa indikator sumber daya dalam penerapan SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari masih kurang maksimal. Meskipun staf yang terlibat dalam penggunaan SIPD RI sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, tetapi dalam penerapannya masih terdapat kendala, seperti jaringan internet yang kurang memadai, hal tersebut dapat memperlambat pekerjaan. Dengan adanya kendala tersebut dapat menghambat dalam proses pelaporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nasution & Nurwani (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD RI masih menghadapi hambatan berupa terbatasnya anggaran dan teknologi, termasuk minimnya tenaga ahli dan infrastruktur yang memadai, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan teknologi. Secara teoritis, temuan ini juga sesuai dengan prinsip *good governance* yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya manusia, teknologi, dan finansial yang dikelola secara optimal, mencakup kemampuan pelaksana, jumlah staf, kewenangan, serta dukungan sarana dan prasarana, karena kekurangan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan program secara efektif, terutama dalam aspek pengawasan dan pengendalian.

#### 4.3 Disposisi

Terdapat tiga indikator untuk mengukur disposisi yakni pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman. Indikator pertama yakni pengetahuan. Pengetahuan pengguna SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari sudah baik dalam memahami fitur dan manfaat SIPD RI. Dalam implementasi SIPD RI, pengguna mendapatkan bimbingan teknis dari BAPPEDA dan BPKAD terkait implementasi SIPD RI, sehingga hal tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pengguna. Dengan adanya bimbingan teknis tersebut sudah cukup dalam meningkatkan pemahaman pengguna yang merupakan indikator kedua dari aspek disposisi. Meskipun para pengguna sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam penerapan SIPD RI, tetapi masih terdapat kendala dalam penerapannya. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menjelaskan masih terdapat kesalahan input data karena salah penafsiran, hal tersebut menyebabkan kegiatan yang direncanakan tidak dapat direalisasikan. Pernyataan tersebut di perkuat Staf Operator Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki pengguna SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari sudah sangat baik, pengetahuan tersebut di dapatkan dari adanya bimbingan teknis yang dilakukan oleh pihak BPKAD dan BAPPEDA. Adanya bimbingan teknis yang diselenggarakan dapat mendukung kelancaran implementasi SIPD RI. Meskipun pengetahuan yang dimiliki sudah baik, tetapi masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kurang telitinya pengguna dalam menginput data.

Disposisi dalam implementasi SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari masih kurang maksimal. Meskipun para pengguna SIPD RI telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait implementasi SIPD RI, seperti paham akan fitur dan manfaatnya yang di dapat dari adanya bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya bimbingan teknis tersebut membuat para pengguna memiliki pengetahuan yang luas terkait implementasi SIPD RI. Tetapi pemahaman yang dimiliki oleh para pengguna masih kurang maksimal, dikarenakan kurang telitinya para pengguna dalam menginput data yang menyebabkan kegiatan yang direncanakan tidak terealisasikan.

Indikator ketiga yakni pendalaman. Pendalaman dimaknai sebagai komitmen pelaksana kebijakan untuk menerapkan kebijakan dengan serius. Pelaksana yang memiliki pendalaman yang baik tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat untuk mengimplementasikan sistem dengan optimal. Pendalaman ini juga berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sekaligus mendorong pelaksana untuk menghadapi tantangan dan terus meningkatkan sistem demi pelayanan publik yang lebih baik.

Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa komunikasi terkait SIPD RI di Kecamatan Summersari telah dilakukan dengan efektif sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaksana, serta berdampak pada kelancaran kebijakan dan meminimalkan kendala dalam proses

implementasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Nasution & Nurwani (2021) yang mengungkapkan bahwa ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia dalam menerima serta beradaptasi dengan transformasi sistem menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan SIPD RI, dimana rendahnya pemahaman teknis dapat menghambat implementasi sehingga diperlukan peningkatan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta dukungan pimpinan agar pelaksana lebih siap dan efektif. Temuan ini juga selaras dengan teori *good governance* yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kesiapan pelaksana yang memiliki pemahaman, keterampilan, serta sikap positif dalam mendukung efektivitas penerapan sistem.

#### 4.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki 2 dimensi yakni dimensi fragmentasi dan *standard operating procedure* (SOP). Dimensi pertama yakni fragmentasi. Fragmentasi dimaknai jika struktur birokrasi yang berantakan dapat menyebabkan kurangnya komunikasi karena pelaksana kebijakan memiliki peluang untuk tersesat dalam berita dan intruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan dalam implementasi SIPD RI antar pengguna di Kantor Kecamatan Summersari telah berjalan dengan baik. Selain itu, tidak ada kendala atau hambatan dalam koordinasi tersebut, dikarenakan para pengguna sering berdiskusi satu sama lain terkait implementasi SIPD RI. Dalam penerapan SIPD RI kolaborasi antar pengguna sudah baik, dengan belajar bersama dalam hal penggunaannya dan saling berdiskusi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan SIPD RI, sehingga tercipta koordinasi yang baik.

Dimensi yang kedua yakni SOP. Para pengguna SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari juga mematuhi dan berpedoman pada SOP yang ada pada *manual book* yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tepat dan konsisten serta tidak ada pelanggaran SOP dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa indikator struktur birokrasi dalam implementasi SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari masih kurang maksimal. Meskipun struktur birokrasi telah berjalan dengan optimal dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antar pengguna, tetapi dalam penerapan SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari masih belum terdapat SOP khusus yang mengatur dalam penerapannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian Karundeng et al. (2021) dan Wurara et al. (2020) yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam penerapan kebijakan berbasis teknologi informasi masih menghadapi hambatan, seperti kurang efisiennya proses, keterlambatan input data, serta belum optimalnya penerapan SOP, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar unit kerja dan SKPD. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kecamatan Summersari, implementasi SIPD RI telah mencerminkan prinsip *good governance* melalui koordinasi yang baik, komunikasi terbuka, serta kejelasan tanggung jawab pelaksana yang mendukung akuntabilitas, didukung dengan penerapan SOP yang sistematis dan keterbukaan dalam menyelesaikan kendala, sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari Kabupaten Jember yang dianalisis melalui empat indikator, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan efektif melalui penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Namun, pada indikator sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih belum optimal. Meskipun sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan telah memadai, masih terdapat kendala pada gangguan teknis sistem dan keterbatasan jaringan internet. Selain itu, sikap dan pemahaman staf terhadap penggunaan SIPD RI sudah baik, tetapi ketelitian dalam penginputan data masih perlu ditingkatkan melalui penguatan mekanisme verifikasi sebelum submit. Dari sisi struktur birokrasi, koordinasi antarbidang telah berjalan dengan baik, namun belum didukung dengan adanya SOP tertulis khusus yang mengatur penggunaan SIPD RI di Kantor Kecamatan Summersari.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada Kantor Kecamatan Sumpalsari di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Kantor Kecamatan Sumpalsari perlu menerapkan sistem pengecekan dua tahap dalam proses penginputan SIPD RI untuk meminimalkan kesalahan data.
2. Kantor Kecamatan Sumpalsari perlu menyusun SOP khusus penggunaan SIPD RI agar proses penginputan, verifikasi, dan pengiriman data berjalan lebih terarah dan seragam.
3. Kantor Kecamatan Sumpalsari perlu menyediakan jaringan internet cadangan guna memastikan kelancaran penginputan dan pelaporan saat terjadi gangguan.
4. Kantor Kecamatan Sumpalsari perlu melakukan bimbingan teknis internal secara berkala, terutama saat terdapat pembaruan fitur SIPD RI, agar pegawai lebih memahami dan teliti dalam penggunaan sistem.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N. Y., Dian, P., & Kusuma, I. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Perkembangan zaman digital saat ini mendorong Kementrian Dalam Negeri dan Salah satu faktor yang meningkatkan efiseinsi penginputan perencanaan*. 12(1).
- Amanah, N. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang*. 1–54.
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. . (2023). *Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Sikka*. 9(1).
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Moenek, & Suwanda. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Nirmala, D., Irfansyah, & Zakir, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ( DTPHP ) Kabupaten Donggala Implementation of the Regional Government Information System ( SIPD ) at the Department of Food Crops , Horticul. *Kolaboratif Sains*, 6(7), 887–894.
- Pembayun, F. (2023). Implementation of Financial Accounting System at The Regional Finance and Asset Management Agency of Banten Province. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 2(4), 451–459. <https://doi.org/10.54408/jabter.v2i4.195>
- Permendagri No. 70. (2019). *BERITA NEGARA*. 1114.
- Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*.
- Sari, C. F. (2024). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kabupaten Magelang*. 1–23.
- Sijabat, J., Judika, M., Siringoringo, B., Findy, G., & Simanjuntak, R. (2024). *Penerapan Sipd ( Sistem Informasi Pemerintah Daerah ) Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dprd Kota*. 9(1), 1169–1183.

Tjandra, R. (2024). *The Determinants of Local Government Information Systems Effectiveness*. 13(3),350–363.

Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). George Edwards. *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado)*, 2(5), 133–138. <https://doi.org/10.4324/9781003080886-10>